

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam ketiga. Zakat wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi ketentuan syariah untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), sedangkan infaq dan shadaqah merupakan bentuk kecintaan hamba terhadap nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* (memiliki sudut pandang keagamaan, sosial, dan ekonomi) yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan yang wajib membayar zakat (*muzakki*) dengan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) (Andriana dkk., 2015). Zakat diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

Zakat dapat berperan dalam program untuk mengatasi kesenjangan ekonomi melalui distribusi zakat. Zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang memiliki inti semangat pemerataan pendapatan (Khalid, 2004). Zakat dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga amil zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dapat dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS setiap tahun menghitung potensi zakat untuk

membuat rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) sedangkan LAZ membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB).

PUSKAS BAZNAS (2019) menjelaskan, bahwa potensi penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah di Jawa Timur pada rentang tahun 2016-2018 sebesar Rp 35.806.700.000.000, namun penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah masih belum maksimal. Rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) LAZISMU Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar Rp 63.988.000.000, namun penerimaan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMU Jawa Timur yang berhasil dihimpun sebesar Rp 17.775.056.153. Sedangkan RAPB LAZISMU Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 sebesar Rp 1.200.000.000, namun penerimaan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMU Kabupaten Mojokerto yang berhasil dihimpun sebesar Rp 518.324.372. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan zakat masih rendah dan jauh dari harapan.

Penerimaan ZISKA yang jauh dari harapan disebabkan karena belum maksimalnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola ZISKA. Hal ini yang dialami oleh LAZISMU Kabupaten Mojokerto, karena pada tahun 2016 LAZISMU Kabupaten Mojokerto berhenti beroperasi karena tidak adanya sumber daya manusia (amil) untuk mengelola ZISKA. LAZISMU Kabupaten Mojokerto pada tahun 2017 mulai beroperasi kembali namun masih kekurangan sumber daya manusia (amil). Pengelolaan ZISKA masih menggunakan sistem relawan sehingga belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap fungsi secara jelas hal ini menyebabkan pengelolaan ZISKA belum dapat terlaksana secara maksimal. Sehingga pada tahun 2019 dikukuhkan kembali SK

badan pengurus dengan amil yang telah professional dibidangnya masing-masing dan telah ditetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap fungsi secara jelas untuk dapat mengelola ZISKA secara maksimal.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya penerimaan zakat, infaq dan shadaqa. Mintarti (2012) menyatakan, bahwa salah satu masalah utama dalam pengelolaan zakat adalah lemahnya sumber daya manusia (amil). Amil sebagian besar tidak menjadikan pekerjaan amil sebagai profesi utama atau pilihan karir, tapi sebagai pekerjaan sampingan. Menurut Septiarini (2011) faktor yang menjadi penyebab rendahnya penerimaan zakat adalah muzakki yang memutuskan untuk tidak menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada karena rendahnya kepercayaan muzakki pada Organisasi Pengelola Zakat sehingga menyebabkan para muzakki lebih memilih untuk menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mereka yang berhak.

Kepercayaan muzakki kepada OPZ dapat ditingkatkan yaitu dengan strategi pengumpulan dan penghimpunan zakat dengan proses *fundraising*. Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan pada donatur (Sani, 2010). Selain itu, OPZ perlu melaksanakan pengendalian internal dikarenakan OPZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah. OPZ dituntut untuk semakin profesional dan mampu mengelola zakat, infaq dan shadaqah

sesuai dengan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2009). Karakteristik OPZ yang baik di antaranya adalah transparan dan akuntabel dalam pengelolaan zakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS menjadi perhatian OPZ. Semakin transparan dan akuntabel OPZ dalam mengelola ZIS, maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap OPZ (Noviatiani & Feriansyah, 2012).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang termasuk dalam organisasi nirlaba perlu membuat laporan keuangan yang relevan dan representatif untuk memenuhi kepercayaan publik sehingga dituntut untuk melakukan sistem pengendalian internal yang dipergunakan sebagai prosedur operasional organisasi untuk mengarahkan dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan penyalahgunaan yang dapat merugikan organisasi (Wijayanti dan Setiawan, 2016). Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh perusahaan yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016).

Pengendalian internal dirancang dengan memiliki tiga tujuan yaitu : reliabilitas pelaporan keuangan dimana manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan kepada para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Efisiensi dan efektivitas operasi yang bertujuan untuk mendorong perusahaan dalam memakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Ketaatan pada hukum dan

peraturan yang mengharuskan perusahaan publik, non publik, dan nirlaba mengeluarkan laporan tentang keefektivan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan mentaati berbagai hukum dan peraturan (Arens & Beasley, 2008).

Ismail dkk (2015) menyatakan, bahwa sistem pengendalian internal penerimaan ZIS yang terdapat pada YDSF Malang, yaitu : Struktur organisasi secara umum sudah menggambarkan adanya pembagian tugas dan wewenang cukup jelas, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan pada pemisahan fungsi dalam sistem pengendalian intern, seperti fungsi kasir yang dikerjakan oleh bagian Fundraising Officer dan Administrasi Penghimpun. Secara akuntabilitas dapat disimpulkan YDSF Malang cukup baik dalam hal pelaporan keuangan mereka, baik dari penerimaan ZIS itu sendiri maupun laporan keuangan secara menyeluruh kepada para donatur. Laporan keuangan dilaporkan setiap bulan melalui majalah yang terbitkan menunjukkan adanya tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan donatur kepada yayasan.

Wardayati & Imaroh (2015) menyatakan, bahwa pengendalian internal yang diterapkan terhadap aktivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) cabang Jember secara keseluruhan telah diterapkan sangat baik dan sudah berjalan dengan efektif dan efisien, meskipun masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya terdapat rangkap tugas dan wewenang dikarenakan jumlah karyawan yang masih sedikit, keterbatas skill SDM yang membutuhkan arahan dan pelatihan agar karyawan

menjadi kompeten dan dapat mendukung pencapaian tujuan OPZ khususnya YDSF cabang Jember.

Nikmatuniayah (2014) menyatakan, bahwa masih terdapat kelemahan dalam kepatuhan sistem pengendalian internal di LAZ kota Semarang, hal ini ditunjukkan pada beberapa LAZ pemisahan tugas dan wewenang belum dilakukan secara tegas, rotasi kerja dan cuti berkala hanya 62,5% LAZ yang memiliki kebijakan tersebut, ketersediaan dokumen yang bernomor urut tercetak pada kuitansi hanya 25% LAZ yang belum menerapkan dengan alasan keterbatasan SDM dan pengetahuan mengenai fungsi adanya dokumen bernomor urut tercetak, hanya 62% LAZ yang memiliki auditor internal dan 25% laporan keuangan LAZ yang telah diaudit oleh auditor independen. Tetapi kelemahan tersebut dapat dikuatkan dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dari manajemen LAZ.

Berdasarkan latar belakang diatas, sistem pengendalian internal sangat penting dilakukan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk meningkatkan kepercayaan publik pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini untuk mengevaluasi praktik sistem pengendalian internal pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah untuk dilihat dari aspek struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana pengendalian internal terhadap pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

Mendeskripsikan pengendalian internal terhadap pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Mojokerto

Manfaat penelitian ini adalah untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi literatur ilmu Akuntansi, khususnya dalam kajian tentang sistem pengendalian internal pada pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan :

Dapat membantu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) untuk dijadikan sebagai masukan mengenai sistem pengendalian internal pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah